

BAB I

PENDAHULUAN

Pengantar

Bab ini akan membahas tentang awal mula terjadinya konflik antara suku kurdi dan Turki. Latar belakang permasalahan, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan. Intinya bab ini membahas tentang proses dan awal Permasalahan-permasalahan yang terjadi diantara pihak kurdi dan Turki. Bagaimana awal terjadinya dan tujuan penulis mengangkat tema ini.

A. Latar Belakang Permasalahan

Separatisme memang menjadi masalah internasional yang cukup sensitif. Menurut data sejak tahun 1950-an, sekitar 70 kelompok etnis yang terkonsentrasi di dalam sebuah wilayah geografis tertentu, terlibat dalam perjuangan senjata bagi penentuan nasib sendiri atau gerakan separatisme. Angka tersebut tentu saja lebih tinggi dari perang antar-negara yang terjadi sejak akhir PD ke-2.¹ Sejak prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) menjadi salah satu prinsip paling fundamental dalam komunitas internasional, kemunculan setiap gerakan separatisme akan selalu disikapi *maximum alert*. Artinya, separatisme yang didesain untuk memporandakan keamanan negara akan mendapat atensi prioritas pemangku kekuasaan. Tidak ada pemerintah di dunia yang sudi membiarkan separatisme menggerogoti keabsahan soliditas, baik sebagai *nation* maupun *state*.

¹"Dreams of Independence" online pada <http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2000/06/0000630.html>. (diakses pada 10 Januari 2013)

Separatisme mengirim sinyal serius kepada masyarakat internasional tentang adanya realitas domestik sebuah negara. Separatisme mudah tersublimasi dalam *domestic constraint* yang memengaruhi opini publik dan sikap pemerintah. Relevansi diplomasi dalam penanganan isu separatisme terbatas pada upaya meyakinkan publik internasional tentang tidak adanya alasan bagi mereka untuk mendelegitimasi sikap tegas pemerintah dalam menumpas gerakan separatisme. Setiap gerakan separatisme pasti selalu tertarik untuk menggunakan medium terbuka yang mereka harapkan dapat membawa isu mereka dalam *spotlight* masyarakat internasional. Atensi masyarakat global terhadap persoalan persoalan domestik telah terinfiltrasi ke dalam berbagai macam bentuk *pressure* atau tekanan. Masalah separatisme domestik yang tidak tertangani baik oleh aparat akan memancing keprihatinan masyarakat internasional. Internasionalisasi persoalan bisa merepotkan, karena biasanya agendanya juga akan dibuat rumit. Dengan demikian, langkah-langkah kuda kedua kelompok separatis itu tetap perlu diwaspadai secara saksama.

Salah satu negara yang juga mengalami permasalahan tersebut adalah Turki. Negara Turki dengan suku etnis Kurdi. Masalah Turki dengan etnis Kurdi tidak bisa dianggap remeh. Konteks tradisi negara Turki mempengaruhi kebijakan yang mereka ambil terhadap kurdi yang pada perkembangannya melakukan separatisme terhadap negara kedaulatan.

Dibandingkan dengan penduduk negara-negara Arab lainnya bahkan di dunia suku Kurdi adalah suku bangsa terbesar karena jumlahnya yang mencapai 30 juta jiwa. Mirip seperti nasib bangsa Palestina, akibat kolonialisme Barat di Timur Tengah, rumpun bangsa Persia yang mendiami daerah Kurdistan ini terancam hilang dalam sejarah dunia.

Karena Palestina berada di bawah pendudukan Israel maka perhatian dunia Islam relatif sangat besar dibandingkan dengan suku Kurdi yang hampir sama sekali tidak ada. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis secara geopolitik dan tersedianya minyak dalam jumlah besar lengkap dengan jalur-jalur pipanya menuju Eropa dan juga Israel, usaha bangsa Kurdi untuk menjadi bangsa yang independen semakin sulit terealisasi. Setiap aktifitas untuk memerdekakan diri selalu berakhir dengan penumpasan dan penindasan. Jalan menuju kemerdekaan bagi Kurdistan seakan menunggu kehancuran tiga negara yang menguasainya. Tumbangnya Rezim Irak karena invasi AS misalnya, berhasil membuka akses politik kaum Kurdi ini.

Dilihat sejarahnya, sebenarnya kemerdekaan Kurdi pernah dijanjikan oleh Presiden AS Woodrow Wilson (1856-1924) melalui perjanjian Sevres (the Treaty of Sevres) tahun 1920 antara Kekhalifahan Turki Usmani dan sekutu AS untuk membagi-bagi wilayah bekas kekuasaan Turki Usmani. Hanya saja terbentuknya negara baru Turki di bawah pimpinan Kemal Atta Turk yang meliputi sebagian besar wilayah Kurdistan telah memupus harapan itu. Sejak itu konflik antara suku Kurdi dan Turki terus berkembang. Paska kemerdekaan Irak tahun 1932 bangsa Kurdi semakin terisolasi dan terpecah-pecah. Mereka yang mendiami daerah-daerah perbatasan ini selalu menjadi korban pertikaian antara Irak, Iran dan Turki. Karena frustrasi akan semakin tertutupnya peluang menuju kemerdekaan, muncullah kelompok-kelompok militan Kurdi yang kerap kali melancarkan aksi-aksi terorisme. Jalan paling mudah untuk memecah kekuatan suku Kurdi dalam menghimpun diri menuju kemerdekaan adalah dengan menciptakan faksi-faksi di antara mereka yang satu sama lain saling bermusuhan. Terpecahnya mereka dalam tiga wilayah negara yang berbeda juga telah membuat suku ini semakin tersegmentasi. Bahkan negara-

negara di mana suku Kurdi berada seringkali mencobamelakukan program asimilasi secara paksa hingga pemusnahan bangsa terbesar di dunia Arab ini.

Di Irak Utara misalnya terdapat dua kubu yang dipimpin oleh Barzani, the Kurdistan Democratic Party (KDP) dan Jalal Talabani The Patriotic Union of Kurdistan (PUK). Keberadaan suku Kurdi yang non-Arab itu ternyata menjadi hambatan tersendiri bagi Saddam Husein dalam menjalankan obsesinya menggelorakan semangat nasionalisme Arab. Pada tahun 2002, PKK berubah nama menjadi Kebebasan dan Demokrasi Kurdistan Kongres (KADEK), diduga melakukan sendiri untuk non-kekerasan kegiatan. Pada tahun 2003, KADEK mengumumkan tiga tahap "peta jalan" untuk menyelesaikan secara damai masalah otonomi Kurdi. Meskipun gencatan senjata, kelompok terus pelatihan militer dan perencanaan dan terus mengancam kekerasan. Pada tahun 2003, KADEK mengumumkan bahwa ia melarutkan sendiri dan menciptakan pan-Kurdi organisasi baru yang disebut Konferensi Rakyat Kurdistan (KHK) yang akan mencari hak Kurdi melalui negosiasi dengan Turki. Para pejabat Turki telah menolak berbagai gerakan ini sebagai taktik PR. Masih belum jelas apa hasil dari reorganisasi ini akan. Pada akhir 2003, KADEK yang berusaha untuk insinyur lain politik face-lift, mengubah nama kelompok Kongra-Gel (KGK) (Kurdistan Kongres Rakyat) dan mengacungkan "damai" nya niat, sambil terus melakukan serangan dan menolak perlucutan senjata.

Turki pada masa Kemal Pasha mengalami perubahan radikal, bahkan dengan revolusioner dari orde lama ke orde baru. Kemal dengan negara barunya memperlihatkan kecenderungan yang sangat berbeda. Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat. Dari sinilah awal konflik dimulai antara Suku Kurdi dengan pemerintah Turki. Sejak tahun 1984 hingga saat ini, pemerintah Turki masih belum bisa mengatasi aksi para

separatisme Kurdi yang telah banyak memakan korban baik dari Turki sendiri maupun kaum Kurdi. Etnis Kurdi di Turki menginginkan perubahan terhadap nasib mereka kemudian menuntut hak-hak yang semestinya mereka terima, baik hak secara etnis minoritas maupun dalam skala yang lebih luas yakni sebagai bangsa. Pemerintah Turki menganggap tuntutan tersebut sebagai ancaman terhadap wilayah kedaulatan negara dan harus segera ditindaklanjuti.

Di sisi lain, republik Turki, sejak berdirinya telah menetapkan perdamaian sebagai pilar utama di negaranya. Damai secara realistis dan konsisten yang dipandu oleh prinsip "*Peace at Home and Peace Abroad*" (damai di rumah dan perdamaian di dunia internasional) ditetapkan oleh Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Turki melaksanakan kebijakan luar negeri yang merupakan generator keamanan dan stabilitas di kawasan dan sekitarnya berdasarkan sekuler demokratis dan sistem politik, ekonomi hidup dan mendamaikan tradisi modernitas dengan identitas budaya. Konflik tersebut tidak hanya menjadi masalah di tingkat nasional tetapi juga di tingkat regional dan internasional. Dampak yang ditimbulkan di tingkat regional adalah menegangnya hubungan antara Turki dan Irak akibat operasi militer lintas batas yang dilakukan Turki ke wilayah Irak bagian utara pada akhir tahun 2006 dan pada tanggal 17 Oktober 2007 disahkannya undang-undang yang mengizinkan angkatan bersenjata Turki untuk melakukan serangan lintas batas guna melumpuhkan serangkaian pemberontakan yang dilakukan oleh para separatisme kurdi yang terkenal sebagai Partiya Kankerran Kurdistan (PKK). Sementara itu, dampak yang ditimbulkan di tingkat internasional adalah melonjaknya harga minyak dunia yang diakibatkan operasi militer oleh pemerintah Turki ke wilayah Irak utara.

Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan konflik bangsa Kurdi yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri dari Iran, Irak dan terutama Turki di mana

konflik bersenjata antara bangsa Kurdi dan pemerintahan Ankara belum usai sejak tahun 1980an ketika PKK memulai operasi-operasi militernya. Setelah sebuah pemaparan sejarah konflik secara singkat, penulis akan fokus kepada kembalinya intensifikasi konflik bersenjata Turki- PKK pada bulan Juli hingga Oktober 2011.

Teori Sebab-Sebab Konflik yang dipaparkan oleh Simon Fisher, dan kawan-kawan dalam “Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak” (The British Council Indonesia, 2001). Simon Fisher menyebutkan bahwa ada enam teori penyebab konflik yang meliputi Teori Hubungan Masyarakat, Teori Negosiasi Prinsip, Teori Identitas, Teori Kesalahpahaman Antarbudaya dan Teori Transformasi Konflik. Dalam hal kasus konflik Kurdi di wilayah Kurdi, penulis akan menggunakan Teori Identitas dan Teori Transformasi Konflik sebagai acuan dan pisau analisis.

Teori Identitas menyebutkan bahwa konflik disebabkan oleh merasa terancamnya identitas sebuah masyarakat atau sebagian dari masyarakat. Akar dari konflik, menurut teori ini adalah dari hilangnya sesuatu yang disebabkan oleh penderitaan atau luka masa lalu yang belum diselesaikan.

Rakyat Kurdistan dianggap sebagai masyarakat kelas dua oleh pemerintah Ankara yang lebih mementingkan etnis Turki dibanding etnis lainnya termasuk etnis Armenia, Yahudi dan Yunani. Hal ini disebabkan oleh praktik yang dilakukan oleh pemerintahan Kekaisaran Ottoman yang membedakan warga-warganya yang Muslim (yaitu masyarakat Turki yang mayoritas) dan non-Muslim (yaitu orang-orang Yahudi, Armenia, Yunani dan Serbia). Praktik ini tetap berlanjut pada masa pemerintahan Republikan di bawah Mustafa Kemal Ataturk yang didirikan pada tahun 1922. Namun, tidak semua masyarakat Turki, terutama yang Muslim, menerima prinsip sekulerisme Republikan yang dijadikan ideologi nasional oleh

Ataturk. Ini termasuk warga Kurdi yang masih memegang teguh kepada ajaran Islam melalui kepercayaan Alevi (yaitu gabungan antara kepercayaan Shia dengan elemen-elemen Sufi) atau ajaran-ajaran Sufi Naqshbandi dan Qadiri. Selain itu, masyarakat Kurdi juga merupakan kelompok etnis terbesar di Republik Turki yang memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Kurdi. Satu elemen kultural yang perlu dicatat mengenai masyarakat Kurdi adalah bahwa masyarakat (*society*) Kurdi berdasarkan kesetiaan-kesetiaan kesukuan (*tribal*) dan masyarakat Kurdi masih tergantung serta patuh kepada pemimpin-pemimpin suku Kurdi. Hal ini menyebabkan adanya beberapa kelompok anggota masyarakat Kurdi yang pro-pemerintah untuk membentuk milisi pembela desa (*village guard*) yang juga ikut terlibat dalam konflik melawan PKK.

Dalam Teori Transformasi Konflik, diasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah sosial seperti ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Masalah-masalah tersebut juga dapat berakar masalah budaya dan sosial.

Bagi masyarakat Kurdi, proyek Ataturk untuk menyatukan seluruh kelompok etnis yang ada di Turki sebagai sebuah “bangsa Turki” merupakan sebuah penindasan budaya. Ini dapat dilihat dari larangan untuk menggunakan bahasa Kurdi dan perayaan Nevruz (Tahun Baru Persia). Ada juga permasalahan pembangunan di wilayah tenggara Turki yang lebih terbelakang dibandingkan wilayah lainnya seperti di wilayah Trakia (Turki Eropa) dan kota-kota Turki di pinggir laut Mediterania. Hal-hal tersebut menyebabkan rasa iri dan ketidakadilan oleh masyarakat Kurdi.

Dapat dilihat di atas bahwa alasan utama dari konflik Kurdi, terutama PKK yang didirikan Abdullah Ocalan, dan pemerintah Republik Turki adalah berdasarkan etnis. Masyarakat Kurdi, seperti halnya kaum etnis minoritas lainnya di Turki, merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas kedua (*second class citizens*). Namun, konflik PKK-Turki jauh lebih intensif karena populasi Kurdi yang besar di Turki,

terpusatnya masyarakat Kurdi di wilayah tenggara Turki dan ketidakpuasan serta kekecewaan beberapa elemen masyarakat Kurdi terhadap pemerintah Turki yang begitu besar sehingga terbentuknya kelompokkelompok bersenjata anti-pemerintah dan pro-kemerdekaan seperti PKK.

Konflik PKK dan pemerintahan Turki yang telah berlangsung cukup lama sejak tahun 1982 tampak tidak akan ada hentinya. Walaupun pendiri organisasi tersebut telah tertangkap, kepemimpinan internal pecah sebagaimana terlihat dari adanya organisasi-organisasi baru, kebebasan yang lebih luas terhadap masyarakat Kurdi dan juga tawaran gencatan senjata dari PKK sendiri, konflik ini tampak seperti belum ada akhir.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian diatas maka perumusan permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:*Apa kebijakan yang diambil pemerintah Turki untuk meresponse pemberontakan PKK suku Kurdi?*

C. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan ini yaitu memakai teori separatisme. Apa itu Separatisme, mengapa muncul separatisme, dan mengapa separatisme itu berhenti.

1. Konsep Separatisme

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa separatisme adalah suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan (bangsa). Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya

kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius².

Menurut Dewi Fortuna Anwar dalam bukunya *Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik* bahwa separatisme berkaitan erat dengan pembentukan negara. Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang rasa benci kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan³Gerakan separatis sering merupakan gerakan yang politis dan damai. Telah ada gerakan separatis yang damai di Quebec, Kanada selama tiga puluh tahun terakhir, dan gerakan yang damai juga terjadi semasa perpecahan Cekoslowakia dan Uni Soviet. Singapura juga lepas dari Federasi Malaysia dengan damai⁴.

Separatisme juga sering merupakan tindak balas yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambilalihan militer yang terjadi dahulu. Di seluruh dunia banyak kelompok teroris menyatakan bahwa separatisme adalah satu-satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai kemerdekaan. Ini termasuk kelompok BasqueETA di Perancis dan Spanyol, separatis Sikh di India pada 1980-an, IRA di Irlandia pada masa pergantian abad dan Front de Libération du Québec pada 1960-an. Kampanye gerilya seperti ini juga bisa menyebabkan perang saudara seperti yang terjadi di Chechnya.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1998. Hal. 210

³ Dewi Fortuna Anwar dkk, *Konflik Kekerasan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 2004. Hal. 213

⁴ www.wikipedia.com/Separatisme - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm di unduh pada tanggal 30 juli 2013

Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok. Daerah Basque di Spanyol, yang belum merdeka selama berabad-abad lamanya, mengembangkan kelompok separatis yang kasar sebagai reaksi terhadap aksi penindasan yang kasar oleh rezim Francisco Franco. Hal yang sama terjadi di Ethiopia di mana para pemberontak Eritrea lebih marah terhadap despotisme dan korupsi daripada sebuah negara Eritrea yang tidak mempunyai sejarah yang panjang.

Bentuk dan akhir cerita gerakan separatis juga sangat beragam. Mulai dari aksi militan para pihak yang disebut "pemberontak", gerakan politik (Cina dan Taiwan), hingga gerakan politik yang dilandasi prinsip agama (India dan Pakistan). Akhir ceritanya pun beragam, seperti persetujuan abadi layaknya Cina dan Taiwan, hubungan "baik" seperti Indonesia dan Timor Leste, atau pembantaian berdarah seperti di Bosnia dan Serbia. Namun penyebabnya selalu sama, kekecewaan terhadap Negara. Kekecewaan tersebut memuncak dan mengkristal menjadi sebuah gerakan inkonstitusional yang tidak lagi menghiraukan rambu-rambu hukum dan struktur kekuasaan. Dalam beberapa kasus bahkan berujung dengan perang saudara.

2. Mengapa muncul separatisme?

Untuk menjelaskan mengapa muncul separatisme penulis mencoba memakai teori Why Men Rebel oleh Ted Robert Gurr⁵. Konsep dasar yang digunakan Gurr dalam mencari jawaban atas serangkaian pertanyaan tersebut adalah "perampasan" (deprivation).

⁵ Ted Gur, *Why Men Rebel*, Princeton, Princeton University Press, 1970

Yang menyebabkan orang berontak adalah perampasan. Orang bisa berontak jika ia merasa sesuatu yang dihargainya dirampas. Rasa dirampas ini disebut "relative deprivation". Perasaan ini muncul akibat tidak sesuainya keinginan dengan kemampuan mencapai apa yang diinginkan.

Kemampuan untuk mencapai keinginan dirasakan ada, tapi upaya mencapainya dihambat atau digagalkan. Kondisi inilah yang menimbulkan rasa dirampas. Apakah anggapan kemampuan itu benar, sesuai dengan kenyataan, itu tidak penting. Yang penting rasa mampu itu ada, dan dihambat. Inilah yang menimbulkan rasa dirampas. Pemberontakan pada umumnya berupa serangan terhadap penguasa. Yang diserang adalah pihak yang dianggap menjalankan kekuasaan, termasuk golongan pesaing politik, pemimpin yang berkuasa atau kebijakannya. Mereka adalah yang dianggap telah merampas.

Gurr membedakan tiga bentuk kekerasan dalam pemberontakan: kekacauan, konspirasi, dan perang dalam negeri. Kekacauan terjadi secara spontan. Meski tidak terorganisasi, namun ia melibatkan banyak orang. Lihat misalnya pemogokan yang diiringi kekerasan, kerusuhan, bentrokan-bentrokan dan pemberontakan lokal.

Berbeda dari kekacauan, konspirasi selalu terorganisir rapi, tapi jumlah pesertanya terbatas. Konspirasi bisa berupa pembunuhan politik, teror skala kecil, gerilya kecil-kecilan, kudeta atau makar. Adapun pemberontakan yang menggunakan kekerasan dengan tujuan politik skala besar, yang terorganisasi baik dan mendapat dukungan luas dari rakyat serta bertujuan menggulingkan kekuasaan, disebut perang dalam negeri. Perasaan dirampas menimbulkan ketidakpuasan (discontent), yang didefinisikan sebagai "kondisi psikologis yang diakibatkan oleh perasaan dirampas". Ketidakpuasan bisa berbentuk

kemarahan, kemurkaan, atau kejengkelan - tergantung pada kedalaman rasa dirampas.

Bila dalam masyarakat ada sarana untuk menyalurkan rasa tidak puas tersebut, maka kadar ketidakpuasan berkurang, dan tidak akan mencapai tingkat marah atau murka. Saluran itu disebut "value opportunities," dan ditafsirkan sebagai kesempatan yang disediakan untuk mencapai apa yang diinginkan.

Jadwal kekerasan biasanya adalah sebagai berikut: Pertama, timbul perasaan tidak puas di kalangan masyarakat. Ini disebabkan ketimpangan antara "hak" dan "kemampuan". Kemampuan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan dianggap sudah ada, sementara hak untuk mencapainya dianggap dihambat.

Rasa tidak puas tersebut kemudian berkembang menjadi politis. Politisasi inilah yang berfungsi memberimakna sosial pada suatu ketidakpuasan pribadi. Ia juga menyebarluaskan rasa solidaritas dan keyakinan bahwa kemarahan yang dirasakan bukan sekadar mengguncang kepentingan pribadi, tapi sudah menyangkut kepentingan orang banyak. Ini membuat orang lebih "sreg" untuk bergerak.

3. Penyebab berhentinya separatisme

Penulis akan mengambil beberapa contoh kasus separatisme di Indonesia untuk menjadi acuan sebab berakhirnya sebuah aksi separatisme.

Yang pertama mungkin pihak yang memberontak sudah mendapatkan apa yang menjadi aspirasi mereka sehingga keinginan untuk melakukan gerakan-gerakan radikal yang menjadi aksi aspirasi mereka, tidak tercipta lagi. Contoh seperti kasus Fretilin Timor Timur di Indonesia. Dimana mereka akhirnya yang mendapat dukungan dari pemerintah Negara lain dan organisasi dunia internasional yang akhirnya mendorong Indonesia menggelar referendum terbatas bagi rakyat Timor-Timur, berhasil mendapatkan kemerdekaan mereka pada tahun 1999.

Yang kedua, yaitu adanya perundingan-perundingan yang membuat pihak yang melakukan aksi separatisme mau menghentikan aksi mereka yang lakukan. Seperti Kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Yang ketiga yaitu karena pihak-pihak yang melakukan spearatisme sudah terdesak dan tidak bias melakukan apa-apa lagi alias kalah.

D. Hipotesa

Penulis menyimpulkan bahwa *kebijakan pemerintah Turki terhadap pemberontak suku Kurdi (PKK) mengalami dinamika seiring dengan respon pemberontak PKK terhadap berbagai tawaran kebijakan pemerintah Turki.*

E. Jangkauan Penelitian

Masalah separatis adalah masalah yang sangat menarik untuk dipaparkan dan dianalisa. Dari sekian banyak masalah separatise yang dilakukan minoritas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut masalah pergerakan suku Kurdi yang berada di Turki. Ternyata separatis Kurdi juga memiliki varian kelompok yang cukup banyak. Untuk mempertajam tingkat analisa, penelitian ini menekankan mengenai gerakan separatisme yang dilakukan suku kurdi pada pemerintahan turki, dan mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintahan turki sampai di tahun 2013 suku kurdi melakukan genjatan senjata terhadap pemerintah turki.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul "Gerakan Separatisme Suku Kurdi di Turki" adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui alasan organisasi PKK suku kurdi di Turki masih melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Turki, sedangkan masyarakat kurdi di Negara lain seperti irak sudah tidak lagi?
2. Mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah Turki untuk meresponse pemberontakan PKK suku Kurdi?
3. Mengetahui penyebab pihak PKK melakukan genjatan senjata terhadap pemerintah Turki di Tahun 2013?

F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan dibahas pada masing-masing bab, sehingga dalam setiap bab akan mempunyai pembahasan topik tersendiri. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian dan jangkauan penelitian

BAB II LATAR BELAKANG SUKU KURDI

Bab II berisi tentang sejarah suku Kurdi, kondisi sosial dan kultur suku Kurdi yang dilihat dari beberapa arah, yaitu bahasa yang digunakan suku Kurdi, agama yang dianut suku Kurdi, mata pencaharian suku Kurdi, sejarah dan kondisi geografis suku Kurdi, kistimewaan dan kelemahan suku Kurdi.

BAB III GERAKAN SEPARATISME SUKU KURDI DI TURKI

Pada bab ini menjelaskan mengenai gerakan separatisme suku Kurdi, kembalinya eskalasi antara PKK suku Kurdi di Turki, dan kebijakan yang diambil pemerintah Turki dalam menghadapi PKK suku Kurdi dilihat kebijakan politik dalam dan luar negeri, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial budaya.

BAB IV ALASAN GENCATAN SENJATA SUKU KURDI DENGAN TURKI TAHUN 2013

Bab IV menjelaskan mengenai genjatan senjata yang dilakukan oleh suku Kurdi terhadap pemerintahan Turki, dan alasan utama suku Kurdi melakukan genjatan senjata dengan pemerintahan Turki.

BAB V KESIMPULAN

Bab V ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan berdasarkan bab-bab sebelumnya.